

STATISTIK KEUANGAN *2016*

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



STATISTIK KEUANGAN *2016*

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



Statistik Keuangan Kabupaten Halmahera Tengah 2016

ISBN : 978-602-662-112-2

No. Publikasi : 82020.1720

Katalog : 7201001.8202

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : x + 62 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Desain Kover :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Ilustrasi Kover :

Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Sumber Ilustrasi :

-

Diterbitkan oleh :

© BPS Kabupaten Halmahera Tengah

Dicetak oleh :

CV.Tara Taro

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 2016 diterbitkan untuk melengkapi kebutuhan pengguna informasi statistik keuangan daerah. Publikasi ini merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah yang pertama diterbitkan.

Data yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 2015 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016. Data tersebut merupakan data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui BPS Kabupaten Halmahera Tengah, yang selanjutnya diolah oleh BPS Kabupaten Halmahera Tengah.

Publikasi ini memuat pula penjelasan tentang konsep dan definisi serta metode pengumpulan data guna mempermudah pemahaman para pengguna data. Kami berharap semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para pengguna data, baik untuk keperluan perencanaan dan analisis maupun evaluasi perkembangan perekonomian secara umum.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga publikasi ini dapat diselesaikan, terutama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sebagai sumber data. Akhirnya, saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan dan pengembangan publikasi yang akan datang.

Weda, November 2017
Kepala BPS
Kabupaten Halmahera Tengah



Iwan Fajar Prasetyawan, S.ST

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
I. PENDAHULUAN	
Latar Belakang	3
Ruang Lingkup Survei	3
Konsep dan Definisi.....	4
II. ULASAN RINGKAS	
Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.....	17
Penerimaan Daerah.....	22
Pengeluaran Daerah	26
III. LAMPIRAN	
Kuesioner K-2 2015	33
Kuesioner APBD 2016.....	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 2015-2016.....	18
Tabel 2. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (miliar rupiah), 2015-2016.....	20
Tabel 3. Persentase Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Mneurut Jenis Penerimaan, 2015-2016.....	63
Tabel 4. Persentase Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Pengeluaran, 2015-2016.....	65

PENJELASAN UMUM

Tanda-tanda, satuan-satuan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. TANDA-TANDA

Data tidak tersedia	: ...
Tidak ada atau nol	: –
Data dapat diabaikan	: 0
Tanda decimal	: ,
Data tidak dapat ditampilkan	: NA
Angka perkiraan	: e
Angka sementara	: x
Angka sangat sementara	: xx
Angka diperbaiki	: r

2. SATUAN

barel	: 158,99 liter = $1/6,2898 \text{ m}^3$
hektar (ha)	: 10 000 m ²
kilometer (km)	: 1 000 meter (m)
knot	: 1,8523 km/jam
kuintal	: 100 kg
KWh	: 1 000 Watt <i>hour</i>
MWh	: 1 000 KWh
liter (untuk beras)	: 0,80 kg
ons	: 28,31 gram
ton	: 1 000 kg

Satuan lain: buah, dus, butir, helai/lembar, kaleng, batang, pulsa, ton kilometer (ton-km), jam, menit, persen (%).

Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka.

1 PENDAHULUAN

<https://haltengkab.bps.go.id>

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya jumlah pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD maupun masyarakat. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana pemerintah daerah tersebut dapat menyelenggarakan aktivitas pemerintahan di wilayahnya, terutama bagi pemerintahan daerah yang masih baru. Penyelenggaraan aktivitas tersebut tentunya terkait erat dengan masalah anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Dengan kata lain, bagaimana suatu pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat potensi suatu daerah dari sisi pendapatan dan pengeluaran, maka dapat disusun kebijakan yang tepat, baik oleh pemerintah daerah itu sendiri, pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka aktivitas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik,

Namun demikian, dalam pembuatan kebijakan tentu diperlukan data yang dapat menggambarkan seluruh potensi Kabupaten/ Kota agar kebijakan yang dibuat lebih terarah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dirasa perlu untuk menyusun Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah.

1.2 Ruang Lingkup Survei

Data pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten/ kota diperoleh dari Bagian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Tengah.

PENDAHULUAN

Data realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah kabupaten dikumpulkan menggunakan kuesioner K-2 oleh BPS Kabupaten Halmahera Tengah, sedangkan data anggarannya dicatat menggunakan kuesioner APBD-2. Kuesioner yang telah terisi dikirim ke BPS-RI melalui BPS Provinsi untuk diolah.

1.3 Konsep dan Definisi

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten adalah realisasi/perhitungan APBD Kabupaten pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya

diserahkan kepada daerah. Salah satu bentuk penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah meliputi pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, pemeliharaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan /atau pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/ olahraga, ijin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/ investasi kepada pihak ketiga.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan / atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi

PENDAHULUAN

Hasil Pajak terdiri atas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain. Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, *landrent*, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalty, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum
2. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
3. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian, DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya.

Lain-lain Pendapatan yang Sah mencakup pendapatan hibah; dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas; dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya; dana penyesuaian dan otonomi khusus dari pemerintah daerah lainnya; dan pendapatan yang sah lainnya.

Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri atas :

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang.

PENDAHULUAN

Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/ lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/ BUMN/ BUMD , badan/ lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/ perorangan.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah digunakan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, yang dilakukan secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

Bantuan Partai Politik adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri atas :

1. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
2. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
3. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
4. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
5. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah provinsi, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dana dan peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri atas :

1. Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
2. Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
3. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
4. Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

PENDAHULUAN

Belanja Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/ upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon,

bangunan, buku/perpustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara pembiayaan penerimaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan daerah terdiri atas :

1. Penerimaan pembiayaan daerah :
 - a. Sisa lebih penghitungan anggaran tahun lalu
 - b. Pencairan dana cadangan
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Penerimaan pinjaman daerah
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
2. Pengeluaran pembiayaan daerah :
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penyertaan modal
 - c. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
 - d. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih dari surplus/ defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun lalu.

PENDAHULUAN

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

<https://haltengkab.bps.go.id>

2 **ULASAN RINGKAS**

<https://haltengkab.bps.go.id>

2.1 Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 merupakan gambaran langkah konkrit pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam perbaikan mutu pelayanannya.

Tabel 1. Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 2015-2016

Indikator	Pertumbuhan		Tingkat Realisasi Anggaran 2015 (%)
	2014-2015 (%)	2015-2016 (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	5.63	18.71	105.63
Belanja Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	14.15	31.39	114.15
PAD Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	27.22	(31.96)	127.22
Pertumbuhan PDB 2015 : 4.34			
Pertumbuhan PDB 2016 : 11.25			

Pemerintah daerah dituntut menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian daerahnya masing-masing agar dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun. Sebagai acuan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2015 tercatat sebesar 4,34 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2016, yaitu sebesar 11,25 persen, maka pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

ULASAN RINGKAS

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin meningkat, mendorong pemerintah daerah untuk menaikkan belanja pemerintah. Realisasi belanja pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah selama tahun 2015 naik 14,15 persen, sedangkan tahun 2016 pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menargetkan kenaikan sebesar 31,39 persen dari realisasi 2015. Tentunya peningkatan belanja pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah ini ditunjang oleh peningkatan pendapatan dimana pada tahun 2015 meningkat 5,63 persen, sedangkan pada tahun 2016 menargetkan ada peningkatan sebesar 18,71 persen. Untuk mengimbangnya, pemerintah mengupayakan peningkatan pendapatan dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar 27,22 persen pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 Pemerintah memperkirakan adanya penurunan sebesar 31,96 persen dari realisasi tahun 2015.

Tingkat realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Halmahera Tengah selama tahun 2015 tercatat cukup tinggi. Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mencapai 105,63 persen dari anggaran yang ditetapkan. Artinya target pendapatan yang ditetapkan Kabupaten Halmahera Tengah telah terlampaui. Pencapaian target pendapatan daerah didukung dengan penerimaan PAD yang melampaui target, yaitu sebesar 127,22 persen. Dari sisi belanja, realisasi belanja pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mencapai 114,15 persen dari anggaran yang ditetapkan. Artinya terjadi pencapaian yang melampaui

anggarannya sehingga digunakan pembiayaan sebagai penyeimbang anggaran pemerintah daerah.

Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih baik, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

<https://haltengkab.bps.go.id>

ULASAN RINGKAS

Tabel 2. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (miliar rupiah), 2015-2016

Rincian	2015	2016 *)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	627	814	29.69
Pendapatan Daerah	583	692	18.71
1 Pendapatan Asli Daerah	22	15	-31.96
2 Dana Perimbangan	526	636	20.88
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	35	41	17.91
Pembiayaan Daerah	45	122	173.13
PENGELUARAN DAERAH	617	814	31.87
Belanja Tidak Langsung	205	263	28.36
1 Belanja Pegawai	171	194	13.67
2 Belanja Bunga	0	0	0.00
3 Belanja Subsidi	0	0	0.00
4 Belanja Hibah	2	12	550.70
5 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00
6 Belanja Bagi Hasil	0	0	0.00
7 Belanja Bantuan Keuangan	32	55	74.76
8 Belanja Tidak Terduga	0	2	386.70
Belanja Langsung	412	548	32.89
1 Belanja Pegawai	25	40	61.34
2 Belanja Barang dan Jasa	166	216	30.32
3 Belanja Modal	222	292	31.61
Pembiayaan Daerah	0	3	#DIV/0!

*) Data APBD

Sementara itu, penerimaan daerah dalam APBD 2016 ditargetkan mengalami kenaikan dibandingkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Pada tahun

2015 penerimaan daerah tercatat sebesar 627 miliar rupiah naik menjadi 814 miliar rupiah pada tahun 2016 atau naik sebesar 29,69 persen. Dari sisi pendapatan daerah, terlihat adanya peningkatan sebesar 18,71 persen, yaitu dari 583 miliar rupiah pada tahun 2015 ditargetkan meningkat menjadi 692 miliar rupiah pada tahun 2016. Peningkatan pendapatan banyak dipengaruhi oleh kenaikan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yaitu masing-masing nilainya sebesar 110 miliar rupiah dan 6 miliar rupiah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah belum secara signifikan menunjang kenaikan pendapatan daerah karena mengalami penurunan sebesar 7 miliar atau sebesar 31,96 persen.

Sejak tahun 2001, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2016 ke Kabupaten Halmahera Tengah ditargetkan mencapai 636 miliar rupiah, mengalami kenaikan dari 526 miliar rupiah pada tahun 2015. Dana perimbangan yang ditransfer dari pemerintah pusat cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan konsekuensi dari keputusan Pemerintah Pusat untuk menganggarkan 26 persen dari pendapatan dalam negeri netto sebagai Dana Alokasi Umum dan penetapan komponen-komponen dana perimbangan yang lain dengan bagi hasil secara persentase, sehingga ketika pendapatan negara meningkat, maka dana bagi hasil yang dialokasikan ke daerah ikut meningkat.

2.2 Penerimaan Daerah

Berbagai cara dilakukan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Pertama, pemerintah Kabupaten memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari atas bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendapatan pendanaan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi atau memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Ketiga, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontinjensi dan bantuan dana darurat. Keempat, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Jika dilihat dari pendapatan daerah, terlihat bahwa pada APBD Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 2016 ditargetkan meningkat dari realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2015. Namun, target kenaikan banyak bergantung pada transfer pemerintah pusat yaitu dana perimbangan, sedangkan PAD dan pendapatan lain-lain diperkirakan masih porsi yang kecil.

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan

kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh Pemerintah Daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi pihak swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota. Pertama, masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh pemerintah kabupaten/kota, tetapi berada di luar wewenang Pemerintah Daerah tersebut. Kedua, BUMD pada umumnya belum beroperasi secara efisien. Hal ini tercermin dari laba bersih yang dihasilkan. Ketiga, rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat, tercermin dari pendapatan perkapita. Keempat, kurang mampunya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan alternatif.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2016 terhadap total penerimaan daerah ditargetkan mengalami penurunan dibanding PAD 2015, yaitu dari 3,50 persen menjadi 1,84 persen. Jika dilihat dari nilai nominalnya PAD juga mengalami penurunan yaitu dari 22 miliar rupiah adatahun 2015 menjadi 15 miliar rupiah pada tahun 2016 (table 2)

Tabel 3. Persentase Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Mneurut Jenis Penerimaan, 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
PENERIMAAN DAERAH	100.00	100.00
Pendapatan Daerah	92.89	85.02
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.50	1.84
1 Pajak Daerah	0.41	0.23
2 Retribusi Daerah	1.41	0.50
3		
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00
4 Lain-lain PAD yang Sah	1.68	1.11
Dana Perimbangan	83.82	78.13
1 Bagi Hasil Pajak	2.41	2.48
2 Bagi Hasil Bukan Pajak	4.37	3.11
3 Dana Alokasi Umum	65.48	54.46
4 Dana Alokasi Khusus	11.57	18.08
Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.56	5.06
Pembiayaan Daerah	7.11	14.98

*) Data APBD

Sumber utama PAD meliputi retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, dengankontribusinya dalam Realisasi APBD 2015 masing-masing sebesar 1,41 persen dan 1,68 persen terhadap total penerimaan. Selain itu, komponen pajak daerah menyumbang kontribusi sebesar 0,41 persen.

2.2.2. Dana Perimbangan

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bersumber dari Dana Perimbangan, di mana dalam realisasi APBD 2015 kontribusinya sebesar 83,82 persen dari total penerimaan. Komponen terbesar dana perimbangan adalah DAU yaitu sebesar 65,48 persen dari total penerimaan dengan nilai nominal sebesar 410,8 miliar rupiah. Komponen berikutnya yang memberikan sumbangan terbesar kedua setelah DAU adalah DAK yaitu sebesar 11,57 persen dari total penerimaan, dengan nilai sebesar 72,6 miliar rupiah.

Secara persentase, kontribusi DAU ditargetkan mengalami penurunan menjadi 54,46 persen, sementara DAK mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 18,08 persen. Pada tahun 2016, komponen bagi hasil bukan pajak memberikan kontribusi sebesar 3,11 persen. Kontribusi terkecil yang termasuk dalam dana perimbangan adalah bagi hasil pajak yaitu sebesar 2,48 persen.

2.2.2 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan 35 miliar rupiah pada tahun 2015 menjadi 41 miliar rupiah pada tahun 2016. Namun apabila dilihat dari kontribusi lain-lain pendapatan yang sah terhadap total penerimaan, kontribusinya turun dari 5,56 persen pada tahun 2015 menjadi 5,06 persen pada tahun 2016. Penerimaan lainnya ini terdiri atas pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus. Dana otonomi khusus merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau *crisis*

ULASAN RINGKAS

solvability ditambah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2.2.3 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah 2016 dianggarkan naik dibandingkan dengan realisasi APBD 2015, yaitu dari 45 miliar rupiah pada tahun 2015 menjadi 122 miliar rupiah pada tahun 2016, atau naik sebesar 173,13 persen. Sejalan dengan hal tersebut, maka kontribusi pembiayaan terhadap penerima juga mengalami kenaikan dari 7,11 persen pada tahun 2015 menjadi 14,98 persen pada tahun 2016.

2.3. Pengeluaran Daerah

Belanja pemerintah daerah pada APBD 2016 dianggarkan meningkat sebesar 31,87 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya (Tabel 2). Belanja tidak langsung diperkirakan meningkat dari 2015 miliar rupiah pada tahun 2015 menjadi 263 miliar rupiah pada tahun 2016 atau naik sebesar 28,36 persen. Begitu juga belanja langsung ditargetkan naik dari 412 miliar rupiah pada tahun 2015 menjadi 548 miliar rupiah pada tahun 2016 atau naik sebesar 32,89 persen. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah 2016 juga ditargetkan mengalami kenaikan sebesar 3 miliar rupiah.

Dilihat dari kontribusinya, belanja langsung memiliki kontribusi terbesar dalam pengeluaran daerah tahun 2015 dengan kontribusi sebesar 66,84 persen, lalu kontribusinya meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 67,36 persen (Tabel 4).

Tabel 4. Persentase Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Pengeluaran, 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
PENGELUARAN DAERAH	100.00	100.00
Belanja Tidak Langsung	33.16	32.27
1. Belanja Pegawai	27.71	23.89
2. Belanja Bunga	-	-
3. Belanja Subsidi	-	-
4. Belanja Hibah	0.29	1.42
5. Belanja Bantuan Sosial	-	-
6. Belanja Bagi Hasil	-	0.01
7. Belanja Bantuan Keuangan	5.11	6.77
8. Belanja Tidak Terduga	0.05	0.18
Belanja Langsung	66.84	67.36
1. Belanja Pegawai	4.04	4.94
2. Belanja Barang dan Jasa	26.87	26.55
3. Belanja Modal	35.94	35.87
Pembiayaan Daerah	-	0.37

*) Data APBD Kabupaten Halmahera Tengah

Peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh meningkatnya kontribusi pada belanja pegawai, yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berencana meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Sementara itu, kontribusi belanja tidak langsung pada tahun 2015 sebesar 33,16 persen, menurun menjadi 32,27 persen pada anggaran 2016 dengan harapan bahwa penurunan belanja daerah tersebut dapat memacu efisiensi anggaran.

2.3.1 Belanja Tak Langsung

ULASAN RINGKAS

Dari sisi belanja tak langsung, terlihat bahwa belanja pegawai paling besar menyerap pengeluaran daerah, yaitu sebesar 23,89 persen pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah 2016. Pada tahun 2015 belanja pegawai juga memberikan kontribusi paling besar yaitu sebesar 27,71 persen. Komponen terbesar setelah belanja pegawai pada tahun 2015 adalah belanja bantuan keuangan yaitu 5,11 persen terhadap total pengeluaran. Sementara itu jenis belanja tak langsung lainnya kurang dari 1 persen. Sama seperti tahun 2015, pada APBD 2016 komponen terbesar setelah belanja pegawai adalah belanja bantuan keuangan sebesar 6,77 persen terhadap total pengeluaran.

2.3.2 Belanja Langsung

Berbeda dengan belanja tak langsung, pada belanja langsung terlihat bahwa belanja modal menyumbang peranan yang paling besar terhadap total pengeluaran daerah tahun 2015 yaitu sebesar 35,94 persen. Realisasi belanja modal ini diperkirakan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2016 menjadi 35,87 persen terhadap total pengeluaran. Nilai belanja modal pada tahun 2015 sebesar 221,74 miliar rupiah naik menjadi sebesar 291,83 miliar rupiah pada tahun 2016. Kontribusi terbesar setelah belanja modal berturut-turut adalah belanja barang dan jasa serta belanja pegawai masing-masing sebesar 26,87 persen dan 4,04 persen dari total pengeluaran pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016, kontribusi belanja barang dan jasa serta belanja pegawai adalah sebesar 26,55 persen dan 4,94 persen dari total pengeluaran. Jika diperhatikan angka nominalnya (tabel 2), seluruh jenis belanja langsung ditargetkan mengalami kenaikan dari realisasi APBD

Kabupaten Halmahera Tengah 2015 di APBD Kabupaten Halmahera Tengah 2016.

2.3.3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah bersumber dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah 2016 diperkirakan mengalami kenaikan, yaitu sebesar 3 miliar rupiah. Kontribusi pembiayaan daerah diperkirakan juga mengalami kenaikan menjadi 0,37 persen dari total pengeluaran.

3 LAMPIRAN

<https://haltengkabpps.go.id>

KUESIONER K2 TAHUN 2016

RAHASIA		K - 2 Keuangan Pemerintah Kab/Kota
REPUBLIK INDONESIA		
SURVEI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA (REALISASI APBD 2015)		
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Data hasil ini digunakan untuk mencatat Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2015. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk penghitungan DAU. Setelah diisi, mohon daftar ini dapat dikirimkan ke kantor BPS setempat paling lambat akhir Bulan Agustus 2016.</i> 2. <i>Pelaksanaan survei ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 11.</i> 3. <i>Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 21.</i> 4. <i>Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No. 10 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 27)</i> 5. <i>Survei ini tidak memungut biaya apapun.</i> 6. <i>Terimakasih disampaikan atas partisipasi dan kerjasamanya.</i> 		
 BADAN PUSAT STATISTIK		

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT		
1.	Provinsi/	<input type="text"/>
2.	Kabupaten / Kota	<input type="text"/>
3.	Alamat Lengkap Kantor Bupati / Walikota	<input type="text"/>
4.	Alamat Lengkap Bagian Keuangan Kantor Bupati / Walikota	<input type="text"/>

BLOK II. RINGKASAN REALISASI 2015 (Ribu Rupiah)	
A. Pendapatan Daerah
B. Belanja Daerah (1+2)
1. Belanja Tak Langsung
2. Belanja Langsung
C. Belanja Menurut Fungsi
D. Pembayaan
1. Penerimaan Pembayaan
2. Pengeluaran Pembayaan
3. Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan

TATA TERTIB PENGOISIAN KUESIONER

- Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- Cara pengisian daftar :
 - Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
 - Lingkari salah satu kode/jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode/jawabannya ke dalam kotak yang tersedia.
 - ~~Isikan~~ Isikan isian ke kotak dengan mengikuti jalajah penuh ke kanan (right justified).
 - Jika kode yang dilingkari lebih dari satu, jumlahkan kode yang dilingkari dan tuliskan pada kotak yang tersedia.

Penjelasan lebih lanjut, hubungi :
 Sub Direktorat Statistik Keuangan
 Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710
 Telepon : (021) 301 0291 - 4, 304 1195, 3042600 pes 0310 Fax : (021) 300 3014
 e-mail : statkeu@bps.go.id; numbowo@bps.go.id

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
A	PENDAPATAN DAERAH (1 + 2 + 3)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1	Hasil Pajak Daerah
1.1.1	Pajak Hotel
1.1.2	Pajak Restoran
1.1.3	Pajak Hiburan
1.1.4	Pajak Reklame
1.1.5	Pajak Penerangan Jalan
1.1.6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
1.1.7	Pajak Parkir
1.1.8	Pajak Air Tanah
1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet
1.1.10	Pajak Lingkungan
1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan
1.1.12	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
1.1.13	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.1.14	Lainnya.....
1.2	Hasil Retribusi Daerah
1.2.1	Retribusi Jasa Umum
1.2.1.1	Retribusi/ Pelayanan Kesehatan
1.2.1.2	Retribusi/ Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1.2.1.3	Retribusi/ Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
1.2.1.4	Retribusi/ Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1.2.1.5	Retribusi/ Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1.2.1.6	Retribusi/ Pelayanan Pasar
1.2.1.7	Retribusi/ Pengujian Kendaraan Bermotor
1.2.1.8	Retribusi/ Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1.2.1.9	Retribusi/ Penggantian Biaya Cetak Peta
1.2.1.10	Retribusi/ Pelayanan Pendidikan
1.2.1.11	Retribusi/ Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1.2.1.12	Retribusi/ Pengelolaan Limbah Cair
1.2.1.13	Retribusi/ Pengendalian Menara Telekomunikasi
1.2.1.14	Retribusi/ Pelayanan Tera/Tera Utang
1.2.1.15	Lainnya.....

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (K-2) 2016

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2015	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
1.2.2 Retribusi Jasa Usaha	
1.2.2.1 Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah	
1.2.2.2 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	
1.2.2.3 Retribusi Tempat Pelelangan	
1.2.2.4 Retribusi Terminal	
1.2.2.6 Retribusi Tempat Khusus Parkir	
1.2.2.6 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	
1.2.2.7 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	
1.2.2.8 Retribusi Rumah Potong Hewan	
1.2.2.9 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
1.2.2.10 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
1.2.2.11 Retribusi Penyeberangan di Air	
1.2.2.12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
1.2.2.13 Retribusi Penjualan Produk/Usaha Daerah	
1.2.2.14 Lainnya.....	
1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu	
1.2.3.1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
1.2.3.2 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
1.2.3.3 Retribusi Izin Gangguan/Keamanan	
1.2.3.4 Retribusi Izin Trayek	
1.2.3.6 Retribusi Izin Usaha Perikanan	
1.2.3.6 Lainnya.....	
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.3.1 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
1.3.2 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
1.3.3 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1.4.1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	
1.4.2 Penerimaan Jasa Giro	
1.4.3 Pendapatan Bunga Deposito	
1.4.4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.4.5 Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
1.4.6 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	

6

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2015		
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)	
(1)	(2)	
1.4.7	Pendapatan Denda Pajak	
1.4.8	Pendapatan Denda Retribusi	
1.4.9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	
1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1.4.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
1.4.13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
1.4.15	Lainnya.....	
2	DANA PERIMBANGAN	
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
2.1.1	Bagi Hasil Pajak	
2.1.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan	
2.1.1.2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
2.1.1.3	Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	
2.1.1.4	Lainnya.....	
2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
2.1.2.1	Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	
2.1.2.2	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	
2.1.2.3	Dana Reboisasi	
2.1.2.4	Iuran Tetap (Land-vent)	
2.1.2.5	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	
2.1.2.6	Pungutan Pengusahaan Perikanan	
2.1.2.7	Pungutan Hasil Perikanan	
2.1.2.8	Pertambangan Minyak Bumi	
2.1.2.9	Pertambangan Gas Bumi	
2.1.2.10	Pertambangan Panas Bumi	
2.1.2.11	Lainnya.....	
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	
2.3.1	Dana Alokasi Khusus Reboisasi	
2.3.2	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (K-2) 2015

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
3.1 Pendapatan Hibah	
3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah	
3.1.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	
3.1.3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	
3.1.4 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	
3.1.6 Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	
3.1.6 Lainnya.....	
3.2 Dana Darurat	
3.2.1 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
3.2.2 Lainnya.....	
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
3.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
3.3.1.1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	
3.3.1.2 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Dilas Air	
3.3.1.3 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
3.3.1.4 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Dilas Air	
3.3.1.6 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
3.3.1.6 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	
3.3.1.7 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	
3.3.1.8 Bagi Hasil dari Pajak Rokok	
3.3.1.9 Lainnya.....	
3.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Lain	
3.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	
3.3.4 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
3.4.1 Dana Penyesuaian	
3.4.2 Dana Otonomi Khusus	
3.6 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
3.6.1 Bantuan Keuangan dari Provinsi	
3.6.2 Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
3.6.3 Bantuan Keuangan dari Kota	
3.6 Lainnya.....	
Catatan : Total Pendapatan Daerah=Pendapatan Asli Daerah+Dana Perimbangan+Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
BELANJA DAERAH (1 + 2)	
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.1 Belanja Pegawai	
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	
1.1.6 Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
1.1.6 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
1.1.7 Lainnya.....	
1.2 Belanja Bunga	
1.2.1 Bunga Utang Pinjaman	
1.2.2 Bunga Utang Obligasi	
1.2.3 Lainnya.....	
1.3 Belanja Subsidi	
1.3.1 Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	
1.3.2 Lainnya.....	
1.4 Belanja Hibah	
1.4.1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
1.4.2 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1.4.3 Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa	
1.4.4 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN	
1.4.5 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	
1.4.6 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat	
1.4.7 Belanja Hibah Dana BOS	
1.4.8 Lainnya.....	
1.5 Belanja Bantuan Sosial	
1.5.1 Belanja Bantuan Sosial Organisasi/ Masyarakat	
1.5.2 Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat	
1.5.3 Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat	
1.5.4 Lainnya.....	

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
1.8 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1.8.1 <i>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Provinsi</i>	
1.8.2 <i>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota</i>	
1.8.3 <i>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa</i>	
1.8.4 <i>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota</i>	
1.8.5 <i>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa</i>	
1.8.6 <i>Lainnya.....</i>	
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1.7.1 <i>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi</i>	
1.7.2 <i>Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota</i>	
1.7.3 <i>Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa</i>	
1.7.4 <i>Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya</i>	
1.7.5 <i>Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</i>	
1.7.6 <i>Lainnya.....</i>	
1.8 Belanja Tidak Terduga	
2 BELANJA LANGSUNG	
2.1 Belanja Pegawai	
2.1.1 <i>Honorarium PNS</i>	
2.1.2 <i>Honorarium Non PNS</i>	
2.1.3 <i>Uang Lembur</i>	
2.1.4 <i>Honorarium Pengelola Dana BOS</i>	
2.1.5 <i>Belanja yang Diberikan kepada Pihak Ketiga</i>	
2.1.6 <i>Lainnya.....</i>	
2.2 Belanja Barang dan Jasa	
2.2.1 <i>Belanja Bahan Pakai Habis</i>	
2.2.2 <i>Belanja Bahan/Material</i>	
2.2.3 <i>Belanja Jasa Kantor</i>	
2.2.4 <i>Belanja Premi Asuransi</i>	
2.2.5 <i>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</i>	
2.2.6 <i>Belanja Cetak dan Penggandaan</i>	

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2015		
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)	
(1)	(2)	
2.2.7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
2.2.8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
2.2.9	Belanja Sewa Alat Berat	
2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	
2.2.12	Belanja Pakaihan Dinas dan Akibatnya	
2.2.13	Belanja Pakaihan Kerja	
2.2.14	Belanja Pakaihan Khusus dan Hari-hari Tertentu	
2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	
2.2.16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
2.2.17	Belanja Pemulangan Pegawai	
2.2.18	Belanja Pemeliharaan	
2.2.19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
2.2.20	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	
2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	
2.2.23	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	
2.2.24	Belanja Barang yang akan Dijual Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	
2.2.26	Lainnya.....	
2.3	Belanja Modal	
2.3.1	Belanja Modal/ Pengadaan Tanah	
2.3.2	Belanja Modal/ Pengadaan Alat-alat Berat	
2.3.3	Belanja Modal/ Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	
2.3.4	Belanja Modal/ Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	
2.3.5	Belanja Modal/ Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	
2.3.6	Belanja Modal/ Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	
2.3.7	Belanja Modal/ Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	
2.3.8	Belanja Modal/ Pengadaan Alat-alat Bengkel	
2.3.9	Belanja Modal/ Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	
2.3.10	Belanja Modal/ Pengadaan Peralatan Kantor	
2.3.11	Belanja Modal/ Pengadaan Perlengkapan Kantor	
2.3.12	Belanja Modal/ Pengadaan Komputer	
2.3.13	Belanja Modal/ Pengadaan Meubelair	
2.3.14	Belanja Modal/ Pengadaan Peralatan Dapur	

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2015	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	
2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	
2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	
2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	
2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	
2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	
2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	
2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	
2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	
2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	
2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	
2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	
2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	
2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	
2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	
2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persejahteraan/Keamanan	
2.3.31 Belanja Modal Dana BOS	
2.3.32 Lainnya.....	

Catatan :

Total Belanja Daerah = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung

BLOK V. REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
C BELANJA MENURUT FUNGSI	
1 PELAYANAN UMUM	
1.1 Perencanaan Pembangunan	
1.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Administrasi Keuangan Daerah	
1.3 Komunikasi dan Informasi	
1.4 Kepegawaian	
1.5 Kesehatan	
1.6 Statistik	
1.7 Penerimaan Kembali Investasi/ Dana Bergulir	
1.8 Lainnya.....	
2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN	
2.1 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
2.2 Lainnya.....	
3 EKONOMI	
3.1 Perhubungan	
3.2 Ketenagakerjaan	
3.3 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3.4 Penanaman Modal	
3.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.6 Pertanian	
3.7 Kehutanan	
3.8 Energi dan Sumber Daya Mineral	
3.9 Kelautan dan Perikanan	
3.10 Perdagangan	
3.11 Industri	
3.12 Ketransmigrasian	
3.13 Ketahanan Pangan	
3.14 Lainnya.....	
4 LINGKUNGAN HIDUP	
4.1 Penataan Ruang	
4.2 Lingkungan Hidup	
4.3 Pertanahan	
4.4 Lainnya.....	

BLOK V. REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2015	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
6 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	
6.1 Pekerjaan Umum	
6.2 Perumahan	
6.3 Lainnya.....	
8 KESEHATAN	
8.1 Kesehatan	
8.2 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
8.3 Lainnya.....	
7 PARIWISATA DAN BUDAYA	
7.1 Pariwisata	
7.2 Kebudayaan	
7.3 Lainnya.....	
8 PENDIDIKAN	
8.1 Pendidikan	
8.2 Pemuda dan Olah Raga	
8.3 Perpustakaan	
8.4 Lainnya.....	
9 PERLINDUNGAN SOSIAL	
9.1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9.2 Sosial	
9.3 Kependudukan dan Catatan Sipil	
9.4 Lainnya.....	

Catatan :

Total Belanja Menurut Fungsi = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung

BLOK VI. REALISASI PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016	
Jenis Pembayaan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
D PEMBIAYAAN	
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
1.2 Pencairan Dana Cadangan	
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	
1.7 Penerimaan Kembali Investasi/ Dana Bergulir	
1.8 Lainnya.....	
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
2.3 Pembayaran Pokok Utang	
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	
2.5 Lainnya.....	
E SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	

Catatan :

Pembayaan = Penerimaan Pembayaan - Pengeluaran Pembayaan

Kontrol :

Pendapatan (A) - Belanja (B) + Pembayaan (D) = Sisa Lebih Pembayaan Anggaran Tahun Berkenaan (E)

BLOK VII. CATATAN

Apabila ada hal-hal yang memerlukan keterangan, bisa dituliskan pada blok ini. Selain informasi dari responden, petugas juga bisa menambahkan catatan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan hasil kuisioner.

1

BLOK VIII. PENGESAHAN

Daftar ini diisi dengan sebenarnya

Menurut keadaan yang sesungguhnya oleh :

Nama : 2016

N I P : Mengetahui

Jabatan : Sekwilda / Kabag. Keuangan

Daerah Kabupaten / Kota

Tanda Tangan :

NIP. :

BLOK IX. KETERANGAN PETUGAS

Uraian	Pencatat	Pemeriksa
1. Nama		
2. N I P		
3. Tanggal Pencatatan / Pemeriksaan		
4. Tanda Tangan		

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik
Jl. dr. Subono No. 6 - B, Kebek Pos 1003, Jakarta - 10010
Telepon : 3041195, 3042506, 3010291 - 5
Teleks : 481159, 481169, 483325, 483376, 483305
Faks : 3057046, E-mail : bps@bps.go.id
Homepage: <http://www.bps.go.id>

RAHASIA



APBD – 2
Keuangan
Pemerintah Kab/Kota

REPUBLIK INDONESIA

**SURVEI STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
(APBD 2016)**

1. Daftar Isian Ini digunakan untuk mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2016. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk penghitungan DAU. Setelah diisi, mohon daftar ini dapat dikirimkan ke kantor BPS setempat paling lambat akhir Bulan Juni 2016.
2. Pelaksanaan survei ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 11.
3. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 21.
4. Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 27).
5. Survei ini tidak emungut biaya apapun.
6. Terimakasih disampaikan atas partisipasi dan kerjasamanya.



BADAN PUSAT STATISTIK

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT		
1.	Provinsi	
2.	Kabupaten / Kota	
3.	Alamat Lengkap Kantor Bupati / Walikota	
4.	Alamat Lengkap Bagian Keuangan Kantor Bupati / Walikota	

BLOK II. RINGKASAN APBD 2016 (Ribu Rupiah)	
A. Pendapatan Daerah
B. Belanja Daerah (1+2)
1. Belanja Tak Langsung
2. Belanja Langsung
C. Belanja Menurut Fungsi
D. Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan
3. Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan

TATA TERTIB PENYISIAN KUESIONER

- Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- Cara pengisian daftar :
 - Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
 - Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang tersedia.
 - Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kalidiah penuh tepi kanan (right justified).
 - Jika kode yang dilingkari lebih dari satu, jumlahkan kode yang dilingkari dan tuliskan pada kotak yang tersedia.

Penjelasan lebih lanjut, hubungi :
 Sub Direktorat Statistik Keuangan
 Jl. Dr. Sutomo No. 5-5, Jakarta 10710
 Telepon : (021) 381 0291 - 4, 354 1195, 3843508 per 6310 Fax : (021) 386 3814
 e-mail : statkieu@bps.go.id; nuwbowo@bps.go.id

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016		
Jenis Pendapatan		Jumlah (Ribu Rp)
(1)		(2)
A	PENDAPATAN DAERAH (1 + 2 + 3)	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
1.1	Hasil Pajak Daerah	
1.1.1	Pajak Hotel	
1.1.2	Pajak Restoran	
1.1.3	Pajak Hiburan	
1.1.4	Pajak Reklame	
1.1.6	Pajak Penerangan Jalan	
1.1.6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	
1.1.7	Pajak Parkir	
1.1.8	Pajak Air Tanah	
1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet	
1.1.10	Pajak Lingkungan	
1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan	
1.1.12	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
1.1.13	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
1.1.14	Lainnya.....	
1.2	Hasil Retribusi Daerah	
1.2.1	Retribusi Jasa Umum	
1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
1.2.1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
1.2.1.3	Retribusi/Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	
1.2.1.4	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	
1.2.1.5	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
1.2.1.6	Retribusi Pelayanan Pasar	
1.2.1.7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
1.2.1.8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
1.2.1.9	Retribusi/Penggantian Biaya Cetak Peta	
1.2.1.10	Retribusi Pelayanan Pendidikan	
1.2.1.11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
1.2.1.12	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	
1.2.1.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
1.2.1.14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
1.2.1.15	Lainnya.....	

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
1.2.2 Retribusi Jasa Usaha	
1.2.2.1 <i>Retribusi/ Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	
1.2.2.2 <i>Retribusi/ Pasar Grosir/Pertokoan</i>	
1.2.2.3 <i>Retribusi/ Tempat Pelelangan</i>	
1.2.2.4 <i>Retribusi/ Terminal</i>	
1.2.2.5 <i>Retribusi/ Tempat Khusus Parkir</i>	
1.2.2.6 <i>Retribusi/ Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa</i>	
1.2.2.7 <i>Retribusi/ Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku</i>	
1.2.2.8 <i>Retribusi/ Rumah Potong Hewan</i>	
1.2.2.9 <i>Retribusi/ Pelayanan Kepelabuhan</i>	
1.2.2.10 <i>Retribusi/ Tempat Rekreasi/ dan Olahraga</i>	
1.2.2.11 <i>Retribusi/ Penyeberangan di Air</i>	
1.2.2.12 <i>Retribusi/ Pengolahan Limbah Cair</i>	
1.2.2.13 <i>Retribusi/ Penjualan Produk/ Usaha Daerah</i>	
1.2.2.14 <i>Lainnya.....</i>	
1.2.3 Retribusi Pertzinan Tertentu	
1.2.3.1 <i>Retribusi/ Izin Mendirikan Bangunan</i>	
1.2.3.2 <i>Retribusi/ Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol</i>	
1.2.3.3 <i>Retribusi/ Izin Gangguan/Keamanan</i>	
1.2.3.4 <i>Retribusi/ Izin Trayek</i>	
1.2.3.5 <i>Retribusi/ Izin Usaha Perikanan</i>	
1.2.3.6 <i>Lainnya.....</i>	
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.3.1 <i>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD</i>	
1.3.2 <i>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/ BUMN</i>	
1.3.3 <i>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta</i>	
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1.4.1 <i>Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</i>	
1.4.2 <i>Penerimaan Jasa Giro</i>	
1.4.3 <i>Pendapatan Bunga Deposito</i>	
1.4.4 <i>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</i>	
1.4.6 <i>Komis/ Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah</i>	
1.4.6 <i>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</i>	

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD-3) 2016

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
1.4.7 Pendapatan Denda Pajak	
1.4.8 Pendapatan Denda Retribusi	
1.4.9 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian	
1.4.11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1.4.12 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
1.4.13 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
1.4.14 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
1.4.15 Lainnya.....	
2 DANA PERIMBANGAN	
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
2.1.1 Bagi Hasil Pajak	
2.1.1.1 Pajak Bumi dan Bangunan	
2.1.1.2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
2.1.1.3 Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	
2.1.1.4 Lainnya.....	
2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
2.1.2.1 Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	
2.1.2.2 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	
2.1.2.3 Dana Reboisasi	
2.1.2.4 Iuran Tetap (Land-rent)	
2.1.2.6 Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	
2.1.2.6 Pungutan Pengusahaan Perikanan	
2.1.2.7 Pungutan Hasil Perikanan	
2.1.2.8 Pertambangan Minyak Bumi	
2.1.2.9 Pertambangan Gas Bumi	
2.1.2.10 Pertambangan Panas Bumi	
2.1.2.11 Lainnya.....	
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	
2.3.1 Dana Alokasi Khusus Reboisasi	
2.3.2 Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016	
Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
3.1 Pendapatan Hibah	
3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah	
3.1.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	
3.1.3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	
3.1.4 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	
3.1.6 Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	
3.1.6 Lainnya.....	
3.2 Dana Darurat	
3.2.1 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
3.2.2 Lainnya.....	
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
3.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
3.3.1.1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	
3.3.1.2 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Dilas Air	
3.3.1.3 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
3.3.1.4 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Dilas Air	
3.3.1.6 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
3.3.1.6 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	
3.3.1.7 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	
3.3.1.8 Bagi Hasil dari Pajak Rolok	
3.3.1.9 Lainnya.....	
3.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Lain	
3.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	
3.3.4 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
3.4.1 Dana Penyesuaian	
3.4.2 Dana Otonomi Khusus	
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
3.5.1 Bantuan Keuangan dari Provinsi	
3.5.2 Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
3.5.3 Bantuan Keuangan dari Kota	
3.5.6 Lainnya.....	
Catatan :	
Total Pendapatan Daerah=Pendapatan Asli Daerah+Dana Perimbangan+Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	

BLOK IV. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
B BELANJA DAERAH (1 + 2)	
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.1 Belanja Pegawai	
1.1.1 Gaji dan Tunjangan	
1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	
1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	
1.1.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah	
1.1.6 Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
1.1.6 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
1.1.7 Lainnya	
1.2 Belanja Bunga	
1.2.1 Bunga Utang Pinjaman	
1.2.2 Bunga Utang Obligasi	
1.2.3 Lainnya	
1.3 Belanja Subsidi	
1.3.1 Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	
1.3.2 Lainnya	
1.4 Belanja Hibah	
1.4.1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
1.4.2 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1.4.3 Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa	
1.4.4 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN	
1.4.6 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	
1.4.6 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat	
1.4.7 Belanja Hibah Dana BOS	
1.4.8 Lainnya	
1.5 Belanja Bantuan Sosial	
1.5.1 Belanja Bantuan Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	
1.5.2 Belanja Bantuan Sosial/ Kelompok Masyarakat	
1.5.3 Belanja Bantuan Sosial/ Anggota Masyarakat	
1.5.4 Lainnya	

BLOK IV. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
1.8 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1.8.1 <i>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Provinsi</i>	
1.8.2 <i>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota</i>	
1.8.3 <i>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa</i>	
1.8.4 <i>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota</i>	
1.8.5 <i>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa</i>	
1.8.6 <i>Lainnya.....</i>	
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1.7.1 <i>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi</i>	
1.7.2 <i>Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota</i>	
1.7.3 <i>Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa</i>	
1.7.4 <i>Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya</i>	
1.7.5 <i>Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</i>	
1.7.6 <i>Lainnya.....</i>	
1.8 Belanja Tidak Terduga	
2 BELANJA LANGSUNG	
2.1 Belanja Pegawai	
2.1.1 <i>Honorarium PNS</i>	
2.1.2 <i>Honorarium Non PNS</i>	
2.1.3 <i>Uang Lembur</i>	
2.1.4 <i>Honorarium Pengelola Dana BOS</i>	
2.1.5 <i>Belanja yang Diberikan kepada Pihak Ketiga</i>	
2.1.6 <i>Lainnya.....</i>	
2.2 Belanja Barang dan Jasa	
2.2.1 <i>Belanja Bahan Pakai Habis</i>	
2.2.2 <i>Belanja Bahan/Material</i>	
2.2.3 <i>Belanja Jasa Kantor</i>	
2.2.4 <i>Belanja Premi Asuransi</i>	
2.2.5 <i>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</i>	
2.2.6 <i>Belanja Cetak dan Penggandaan</i>	

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD-3) 2016

BLOK IV. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
2.2.7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
2.2.8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
2.2.9 Belanja Sewa Alat Berat	
2.2.10 Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	
2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman	
2.2.12 Belanja Pakialan Dinas dan Atributnya	
2.2.13 Belanja Pakialan Kerja	
2.2.14 Belanja Pakialan Khusus dan Hari-hari Tertentu	
2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas	
2.2.16 Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
2.2.17 Belanja Pemulangan Pegawai	
2.2.18 Belanja Pemeliharaan	
2.2.19 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
2.2.20 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
2.2.21 Belanja Jasa Konsultasi	
2.2.22 Belanja Barang Dana BOS	
2.2.23 Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	
2.2.24 Belanja Barang yang akan Dijual Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	
2.2.25 Lainnya	
2.3 Belanja Modal	
2.3.1 Belanja Modal Pengadaan Tanah	
2.3.2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
2.3.3 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	
2.3.4 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	
2.3.5 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	
2.3.6 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	
2.3.7 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	
2.3.8 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	
2.3.9 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	
2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	
2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor	
2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer	
2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeutair	
2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenToto (APBD-3) 2016

11

BLOK IV. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	
2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	
2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	
2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	
2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	
2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	
2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	
2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	
2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	
2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	
2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	
2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	
2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	
2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	
2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	
2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Kelengkapan	
2.3.31 Belanja Modal Dana BOS	
2.3.32 Lainnya	

Catatan :

Total Belanja Daerah = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung

BLOK V. ANGGARAN BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016	
Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
C BELANJA MENURUT FUNGSI	
1 PELAYANAN UMUM	
1.1 Perencanaan Pembangunan	
1.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Administrasi Keuangan Daerah	
1.3 Komunikasi dan Informasi	
1.4 Kepegawaian	
1.5 Kearsipan	
1.6 Statistik	
1.7 Lainnya.....	
2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN	
2.1 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
2.2 Lainnya.....	
3 EKONOMI	
3.1 Perhubungan	
3.2 Ketenagakerjaan	
3.3 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3.4 Penanaman Modal	
3.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.6 Pertanian	
3.7 Kehutanan	
3.8 Energi dan Sumber Daya Mineral	
3.9 Kelautan dan Perikanan	
3.10 Perdagangan	
3.11 Industri	
3.12 Ketransmigrasian	
3.13 Ketahanan Pangan	
3.14 Lainnya.....	
4 LINGKUNGAN HIDUP	
4.1 Penataan Ruang	
4.2 Lingkungan Hidup	
4.3 Pertanahan	
4.4 Lainnya.....	

BLOK V. ANGGARAN BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA TAHUN ANGGARAN 2016	
Jenis Belanja (1)	Jumlah (Ribu Rp) (2)
6 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	
6.1 Pelembagaan Umum	
6.2 Perumahan	
6.3 Lainnya	
6 KESEHATAN	
6.1 Kesehatan	
6.2 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
6.3 Lainnya	
7 PARWISATA DAN BUDAYA	
7.1 Pariwisata	
7.2 Kebudayaan	
7.3 Lainnya	
8 PENDIDIKAN	
8.1 Pendidikan	
8.2 Pemuda dan Olah Raga	
8.3 Perpustakaan	
8.4 Lainnya	
9 PERLINDUNGAN SOSIAL	
9.1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9.2 Sosial	
9.3 Kependudukan dan Catatan Sipil	
9.4 Lainnya	

Catatan :

Total Belanja Menurut Fungsi = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung

BLOK VI. ANGGARAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016	
Jenis Pembayaan	Jumlah (Ribu Rp)
(1)	(2)
D PEMBIAYAAN	
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
1.2 Pencairan Dana Cadangan	
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
1.8 Lainnya.....	
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	
2.2 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	
2.3 Pembayaran Pokok Utang	
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	
2.5 Lainnya.....	
E SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	

Catatan :

Pembayaan = Penerimaan Pembayaan - Pengeluaran Pembayaan

Kontrol :

Pendapatan (A) - Belanja (B) + Pembayaan (D) = Sisa Lebih Pembayaan Anggaran Tahun Berkenaan (E)

BLOK VII. CATATAN

Apele ada hal-hal yang memerlukan ketelengon, bisa ditulis pada blok ini.
Selain informasi dari responden, petugas juga bisa menambahkan catatan
untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan item kuisioner.

BLOK VIII. PENGESAHAN

Daftar ini diisi dengan sebenarnya

Menurut keadaan yang sesungguhnya oleh :

Nama : 2016

N I P : Mengetahui

Jabatan : Sekwilda / Kabag. Keuangan
Daerah Kabupaten / Kota

Tanda Tangan :

NIP. :

BLOK IX. KETERANGAN PETUGAS

Uraian	Pencatat	Pemeriksa
1. Nama		
2. N I P		
3. Tanggal Pencatatan / Pemeriksaan		
4. Tanda Tangan		

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik
Jl. dr. Subono No. 6 - B, Kibak Pos 1003, Jakarta - 10010
Telepon : 3041194, 3042500, 3010291 - 5
Telek : 401159, 401159, 40325, 40379, 40305
Faks : 3057046, E-mail : bpsinfo@bps.go.id
Homepage: <http://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://haltenkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**
Jl. Poros Weda - Payahe
Homepage : <http://haltengkab.bps.go.id>
E-mail : bps8202@bps.go.id

